

Nomor : B/305/RB.06/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Tahun 2025**

10 April 2026

Yth.
Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
di
Tempat

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Evaluator Nasional telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Jember. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, Keputusan Menteri PANRB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dalam rangka mencapai sasaran “Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif” serta “Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional”. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas RB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, Indeks RB Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2025 adalah **86,49** dengan kategori “**A-**”. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Penilaian	Bobot	2024	2025
A	RB General	100*	72,27	72,82
B	RB Tematik	20	13,98	13,67
C	Indeks RB	120	86,25	86,49
			A-	A-

*) Beberapa instansi pemerintah mengalami penyesuaian Bobot disebabkan partisipasi dalam penilaian Meso, data penyesuaian bobot masing masing instansi pemerintah dapat diakses pada Portal RB Nasional

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 260408HWWK
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.

Hasil evaluasi tahun 2025 menunjukkan peningkatan dari hasil evaluasi tahun sebelumnya. Secara lengkap rincian hasil evaluasi RB, baik nilai, catatan, dan rekomendasi pada setiap indikator dapat diakses melalui <https://portalrb.menpan.go.id>.

Demikian laporan hasil evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya kami harapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi birokrasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ERWAN AGUS PURWANTO

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
NIP. 196808021998031001

Tembusan

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Menteri Dalam Negeri
3. Bupati Jember

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 260408HWWK
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Hasil Evaluasi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember - LKE KEMENPANRB

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Target Baik	Skor	Skor Index	Capaian Index (%)	Catatan	Rekomendasi	Sanggah
1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3		2,38	2,38	79,33	4. Rencana Aksi belum sepenuhnya relevan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama 5. Indikator Output atas Rencana Aksi sudah relevan, namun belum cukup menggambarkan Sasaran yang ingin diwujudkan 6. Penetapan target atas Output belum sepenuhnya didasarkan pada target Sasaran Kegiatan Utama 7. Rencana Aksi belum sepenuhnya didukung dengan anggaran yang memadai	4. Memastikan Rencana Aksi relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama 5. Memastikan seluruh indikator Output atas Rencana Aksi cukup menggambarkan Sasaran 6. Melakukan reviu agar target atas Output didasarkan pada target Sasaran Kegiatan Utama 7. Melakukan reviu agar Rencana Aksi didukung dengan anggaran yang memadai dan memperhatikan efektifitas serta efisiensi	-
2	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7		100,00	5,55	79,33	Total Rata Rata Capaian Output Rencana Aksi RB General sebesar 100%.Capaian Tingkat Implementasi dipengaruhi oleh Capaian Kualitas Rencana Aksi RB General		-
3	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	3	4,01	5,00	3,00	100,00			

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Target Baik	Skor	Skor Index	Capaian Index (%)	Catatan	Rekomendasi	Sanggah
4	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Maturitas SPIP	4	3,00	3,01	2,41	60,25	1. Penetapan tujuan dan cascading kinerja belum berkualitas karena sasaran, indikator, dan target belum berorientasi hasil, tidak SMART, tidak saling terkait antar level perencanaan, serta belum secara tepat menggambarkan sasaran strategis, program, kegiatan, dan subkegiatan. 2. Struktur dan proses penyelenggaraan SPIP belum berjalan efektif dan konsisten, tercermin dari lemahnya kepemimpinan yang kondusif, hubungan kerja antarlembaga, kualitas informasi, serta pelaksanaan pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah. 3. Manajemen risiko belum terintegrasi secara menyeluruh dalam proses bisnis dan perencanaan, ditandai dengan keterbatasan alokasi sumber daya, rendahnya kompetensi SDM, belum	Berdasarkan hasil evaluasi, kami menyarankan kepada Bupati Jember agar menginstruksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember selaku penanggungjawab atas penyelenggaraan SPIP untuk: 1) Memperbaiki cascading perencanaan sesuai proses bisnis dan menetapkan indikator kinerja yang berorientasi outcome, memenuhi kriteria SMART, dan didukung target yang tepat; 2) Melaksanakan reviu independen terhadap proses manajemen risiko yang ada di OPD; 3) Menerapkan kebijakan pengelolaan risiko kemitraan yang terintegrasi dengan proses bisnis pemerintah daerah; 4) Menginstruksikan kepada Kepala Perangkat Daerah agar: a) Melakukan analisis risiko secara memadai terhadap risiko operasional unit kerja dan risiko strategis unit kerja; b) Menetapkan MRI sebagai salah satu	

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Target Baik	Skor	Skor Index	Capaian Index (%)	Catatan	Rekomendasi	Sanggah
									digunakannya MRI sebagai indikator kinerja, serta lemahnya analisis risiko yang konsisten dan berbasis kebijakan. 4. Proses komunikasi, revidi, dan monitoring risiko belum memadai, terlihat dari belum menyeluruhnya pengomunikasian kebijakan, register risiko, dan RTP, serta belum optimalnya revidi independen, pemantauan risiko, dan evaluasi efektivitas pengendalian. 5. Pengendalian korupsi belum sepenuhnya berbasis risiko dan berkelanjutan, ditunjukkan oleh keterbatasan cakupan kebijakan antikorupsi, inkonsistensi penerapan SOP cegah-deteksi-respons, keterbatasan SDM, belum lengkapnya peta risiko dan RTP korupsi, serta belum optimalnya implementasi tindak pengendalian pada kegiatan utama.	indikator di tingkat perangkat daerah; c) Meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko untuk seluruh pegawai; d) Melakukan evaluasi atas sistem pengaduan secara berkala; e) Melakukan revidi atas seluruh risiko operasional dan risiko strategis unit kerja; f) Melakukan monitoring atas risiko dan efektivitas RTP terhadap risiko operasional dan risiko strategis unit kerja.	
5	RB General	Capaian Pelaksanaan	Tingkat Keberhasilan	3.5	2,50	0,50	0,50	14,29			

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Target Baik	Skor	Skor Index	Capaian Index (%)	Catatan	Rekomendasi	Sanggah
		Kebijakan Reformasi Birokrasi	Pembangunan ZI								
6	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP	4	60,01	65,43	2,62	65,50	Catatan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP 2025 dapat diakses pada portal rb nasional dengan menggunakan akun instansi		
7	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2.5	3,00	0,00	0,00	0,00	Instansi belum melakukan penyusunan Arsitektur SPBE sesuai standar		Status Sanggah: ditolak Keterangan Sanggah: Dinas Komunikasi dan Informatika bersama dengan Bagian Organisasi Kabupaten Jember telah melakukan pengisian pada aplikasi https://arsitektur.spbe.go.id , Bukti dukung selengkapnya pada surat terlampir Keterangan Tanggapan Sanggah: Penyusunan arsitektur SPBE dalam evaluasi RB dinilai berdasarkan proses penginputan arsitektur pada aplikasi SIA SPBE V2, hal ini telah kami lakukan sosialisasi beberpaa kali bahwa penilaian arsitektur

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Target Baik	Skor	Skor Index	Capaian Index (%)	Catatan	Rekomendasi	Sanggah
											untuk evaluasi RB dinilai dari proses penyusunan arsitektur pada aplikasi SIA SPBE V2 serta sosialisasi penyusunan arsitektur mengikuti periode RPJMN tahun 2025-2029
8	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Digitalisasi Arsip	2.5	60,01	72,46	1,81	72,40	Penjelasan catatan tingkat digitalisasi arsip dapat dikonfirmasi ke Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan ANRI	Penjelasan rekomendasi tingkat digitalisasi arsip dapat dikonfirmasi ke Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan ANRI	
9	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	2.5	4,00	3,00	1,50	60,00	Berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan pengaduan masyarakat, masih terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian, yaitu: • Persentase tindak lanjut pengaduan masih di bawah 90% dari total laporan yang diterima. • Rata-rata waktu respon awal terhadap pengaduan masih melebihi 3 (tiga) hari kerja.	Sehubungan dengan hasil evaluasi pengelolaan pengaduan masyarakat, disampaikan beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti, sebagai berikut: • Melakukan evaluasi dan perbaikan pengelolaan pengaduan guna mendorong seluruh unit penerima aduan untuk menindaklanjuti seluruh pengaduan yang diterima. • Mempercepat proses respon awal dan tindak lanjut pengaduan agar sesuai dengan standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan.	Status Sanggah: ditolak Keterangan Sanggah: Hasil pengecekan pada website SP4N LAPOR! di akun Pemerintah Kabupaten Jember dengan periode laporan masuk 1 Januari - 31 Desember 2025 di dapatkan % Tindak Lanjut sebesar 97,1% dengan lampiran hasil screenshot sebagai berikut Keterangan Tanggapan Sanggah: Berdasarkan hasil verifikasi dan

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Target Baik	Skor	Skor Index	Capaian Index (%)	Catatan	Rekomendasi	Sanggah
											penelaahan atas substansi laporan serta bukti tindak lanjut yang disampaikan, sanggah yang diajukan dinyatakan ditolak.
10	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Kualitas Kebijakan	2.5	65,00	75,60	1,89	75,60	Fully Participant (Baik)	Peningkatan kualitas kebijakan pada dimensi perencanaan, implementasi, evaluasi dan transparansi dan partisipasi publik	
11	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Hukum	2.5	70,01	87,48	2,19	87,60	melebihi target		
12	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pembangunan Statistik	2.5	2,60	2,02	1,01	40,40	•Pada Aspek Pemenuhan SDM yang Memadai dan Kabapel, Pemerintah Daerah Kabupaten Jember telah menyediakan Analisis Beban Kerja (ABK) bagi SDM di bidang manajemen data dan bidang statistik. Pegawai diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan kemampuan melalui keikutsertaan pada webinar-webinar yang utamanya diselenggarakan oleh		Status Sanggah: ditolak Keterangan Sanggah: Skor yang digunakan pada dokumen LKE KEMENPAN RB 2025 adalah capaian nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kabupaten Jember tahun 2024 : 2,02 sedangkan capaian nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kabupaten Jember tahun 2025 : 2,7 dari

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Target Baik	Skor	Skor Index	Capaian Index (%)	Catatan	Rekomendasi	Sanggah
									instansi yang berhak memberikan sertifikasi seperti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur. •Penerapan Aspek Pengorganisasian Statistik telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melalui penyelenggaraan kolaborasi dan forum SDI yang diperkuat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/543/1.12/2023 tentang Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jember. Salah satu wujud kolaborasi adalah adanya kesepakatan dalam penentuan daftar data dan verifikasi final daftar data yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Dinas Komunikasi dan Informatika		nilai maksimal 5 sehingga skor Kabupaten Jember pada indikator penilaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) seharusnya sebesar $2,7/5 = 54,00\%$. Keterangan Tanggapan Sanggah: Nilai IPS di Portal RB sudah sesuai dengan nilai yang disampaikan oleh BPS berdasarkan Keputusan Kepala BPS Nomor 605 Tahun 2024. Untuk penilaian RB 2025 menggunakan nilai IPS 2024 bukan menggunakan nilai self assessment

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Target Baik	Skor	Skor Index	Capaian Index (%)	Catatan	Rekomendasi	Sanggah
									(Diskominfo). Bappeda sebagai koordinator telah menginisiasi penyelenggaraan Forum SDI dengan menyusun Rencana Aksi. Diskominfo juga telah memenuhi tiga tugas utamanya sebagai walidata yaitu penyebarluasan data melalui portal satu data, pemeriksaan data melalui validasi data, dan pembinaan melalui bimbingan teknis.		
									•Penerapan Indikator Perencanaan Pembangunan Statistik belum mencapai tingkat kematangan terdefinisi. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember belum mengadopsi Rencana Aksi yang telah disepakati dalam Forum Satu Data.		
									•Pemerintah Daerah Kabupaten Jember belum menerapkan SOP atau petunjuk teknis yang mudah dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh produsen data terkait penerapan seluruh aspek dan indikator pada Domain		

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Target Baik	Skor	Skor Index	Capaian Index (%)	Catatan	Rekomendasi	Sanggah
									Kualitas Data. •Pemerintah Daerah Kabupaten Jember belum menerapkan Indikator Penyediaan Format Data. Data pada Portal Satu Data Kabupaten Jember hanya dapat diunduh dalam bentuk excel. Belum ditemukan bukti dukung terkait penggunaan format data yang beragam.		
13	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2.5	70,01	80,04	2,00	80,00	(1) Tingkatkan pemanfaatan sistem pada Non e-Tendering/ Non e-Purchasing, e-Katalog, e-Kontrak. (2) Keterisian JF PPBJ masih jauh dari memenuhi 100% walaupun sudah di atas 60%. (3) Level Kematangan sudah mencapai Level 3 (Proaktif). Selanjutnya, persiapan untuk mengusulkan penilaian PKP Proaktif.	Lakukan persiapan penilaian ITKP 2026 sesuai metode penilaian baru.	
14	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Sistem Merit	4	250,00	292,50	2,85	71,25	2024		
15	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan	Indeks Pelayanan Publik	2	3,51	4,68	1,87	93,50		Disampaikan melalui LHE yang disampaikan deputi pelayanan publik.	

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Target Baik	Skor	Skor Index	Capaian Index (%)	Catatan	Rekomendasi	Sanggah
		Reformasi Birokrasi									
16	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	2	78,00	98,15	1,96	98,00			
17	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks SPBE	9	2,60	3,54	6,38	70,89			
18	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Opini BPK	5	3,00	3,00	5,00	100,00			
19	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	75,00	89,25	3,57	89,25			
20	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks BerAkhlak	4	50,00	79,72	3,19	79,75	Kategori Sehat		
21	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Penilaian Integritas	10	77,50	68,89	6,89	68,90		Pemerintah Kabupaten Jember perlu meningkatkan kejelasan informasi layanan dengan mengemas prosedur layanan secara jelas dan interaktif. Hal ini dapat dilakukan melalui inovasi yang	

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Target Baik	Skor	Skor Index	Capaian Index (%)	Catatan	Rekomendasi	Sanggah
										memanfaatkan teknologi digital, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan. Selain itu, evaluasi prosedur pelaksanaan kegiatan layanan melalui survei kepuasan layanan juga sangat penting untuk mengetahui sejauh mana masyarakat merasa puas dengan layanan yang diberikan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan transparansi dalam layanan publik dapat meningkat, dan masyarakat merasa lebih terlibat dalam proses pelayanan. Selanjutnya, dalam upaya memudahkan masyarakat memahami prosedur layanan, Pemerintah Kabupaten Jember disarankan untuk terus melakukan pengemasan informasi yang bersifat interaktif. Ini termasuk penggunaan media sosial dan aplikasi mobile yang dapat memberikan informasi secara real-time. Evaluasi berkala	

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Target Baik	Skor	Skor Index	Capaian Index (%)	Catatan	Rekomendasi	Sanggah
										terhadap prosedur layanan juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan selalu relevan dan mudah dipahami. Dengan demikian, masyarakat akan lebih percaya diri dalam menggunakan layanan yang tersedia dan mengurangi potensi kesalahpahaman yang dapat terjadi. Dalam konteks pengawasan terhadap gratifikasi dan benturan kepentingan, Pemerintah Kabupaten Jember harus melakukan sosialisasi dan penyegaran aturan terkait dengan hal ini. Langkah ini harus diikuti dengan mekanisme ujian untuk memastikan bahwa semua pegawai memahami dengan baik peraturan yang ada. Penegakan aturan yang tegas dan tanpa pandang bulu juga harus diterapkan, termasuk peluncuran ISO-37301 sebagai Sistem Manajemen Kepatuhan. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta	

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Target Baik	Skor	Skor Index	Capaian Index (%)	Catatan	Rekomendasi	Sanggah
										lingkungan kerja yang bebas dari praktik suap dan gratifikasi. Pemerintah Kabupaten Jember juga perlu menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan komprehensif untuk pengadaan barang dan jasa. Ini mencakup proses tender, evaluasi, dan pengelolaan kontrak yang transparan. Pelatihan dan sosialisasi kepada staf mengenai SOP baru dan standar harga juga sangat penting untuk memastikan keseragaman dalam implementasi. Selain itu, pencarian vendor yang capable harus terus dilakukan untuk mengatasi masalah konflik kepentingan, dengan memanfaatkan platform digital untuk pengumuman pengadaan yang lebih luas. Dalam hal pengadaan barang dan jasa, penting bagi Pemerintah Kabupaten Jember untuk memperkuat pengawasan internal dan menerapkan sanksi	

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Target Baik	Skor	Skor Index	Capaian Index (%)	Catatan	Rekomendasi	Sanggah
										yang tegas terhadap pelanggaran. Proses pengadaan secara elektronik juga harus disiapkan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kualitas barang dan jasa yang diperoleh akan lebih sesuai dengan harga yang dibayarkan, serta mengurangi potensi terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan. Menyikapi potensi hubungan kedekatan antara penyedia barang/ jasa dan pejabat, Pemerintah Kabupaten Jember disarankan untuk melakukan edukasi dan bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Melakukan due diligence terhadap vendor dan memasukkan vendor yang tidak berintegritas ke dalam daftar hitam juga merupakan langkah yang perlu diambil. Selain itu, membuka ruang	

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Target Baik	Skor	Skor Index	Capaian Index (%)	Catatan	Rekomendasi	Sanggah
										pengadaan yang lebih luas dan melibatkan masyarakat secara efektif dalam proses pengadaan akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah Kabupaten Jember juga perlu mengimplementasikan kebijakan dan mekanisme pelaporan terkait gratifikasi di instansi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang melanggar etika dapat dilaporkan dan ditindaklanjuti dengan baik. Dengan adanya sistem pelaporan yang jelas, diharapkan pegawai akan lebih berani melaporkan pelanggaran yang terjadi, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih bersih dan transparan. Dalam rangka memastikan hasil pengadaan barang dan jasa yang bermanfaat, Pemerintah Kabupaten Jember disarankan untuk mewajibkan survei kebutuhan sebelum	

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Target Baik	Skor	Skor Index	Capaian Index (%)	Catatan	Rekomendasi	Sanggah
										pelaksanaan pengadaan. Pengembangan sistem aplikasi e-catalog atau e-procurement juga sangat penting untuk memfasilitasi input data kebutuhan dari setiap direktorat atau divisi. Selain itu, penerapan mekanisme monitoring dan evaluasi yang ketat serta penguatan kerjasama antara pengawas internal dan eksternal akan membantu mendeteksi masalah dalam proses pengadaan. Pemerintah Kabupaten Jember perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait standar prosedur operasional dalam pelaksanaan sanksi atau denda kepada pengguna layanan. Pengembangan aplikasi teknologi untuk menjalankan mekanisme denda secara elektronik juga harus dipertimbangkan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses penegakan sanksi dapat dilakukan secara lebih efisien dan	

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Target Baik	Skor	Skor Index	Capaian Index (%)	Catatan	Rekomendasi	Sanggah
										transparan, sehingga masyarakat merasa lebih adil dalam mendapatkan layanan. Terakhir, dalam aspek rekrutmen dan promosi pegawai, Pemerintah Kabupaten Jember harus melakukan sosialisasi mengenai peraturan terkait gratifikasi dan benturan kepentingan. Program kepemimpinan yang terkait dengan kepatuhan juga perlu dijalankan untuk meningkatkan integritas pegawai. Dengan menerapkan kaidah SNI-ISO 37001 dan SNI-ISO 37301, diharapkan proses rekrutmen dan promosi dapat dilakukan secara adil dan transparan, tanpa adanya pengaruh dari faktor-faktor eksternal yang tidak relevan.	
22	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Kepuasan Masyarakat	8	76,61	89,38	7,15	89,38		Mempertahankan kualitas pelayanan publik serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan, Mengoptimalkan data hasil SKM sebagai dasar perbaikan pelayanan.	
23	RB General	Capaian	Capaian IKU	4		95,75	3,83	95,75		-	

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Target Baik	Skor	Skor Index	Capaian Index (%)	Catatan	Rekomendasi	Sanggah
		Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Makro								
24	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian IKU Non Makro	6	90,00	83,33	3,27	54,50	Sebagian besar IKU telah mencapai target kinerja $\geq 90\%$, namun masih terdapat beberapa IKU yang belum memenuhi target. Hal ini menunjukkan kinerja belum sepenuhnya optimal.	Memperkuat perencanaan dan pengendalian kinerja, serta melakukan evaluasi berkala terhadap IKU yang belum tercapai untuk mengatasi hambatan pencapaian kinerja.	
25	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	1		0,69	0,69	69,00	1. Kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi 2. Rencana aksi belum memuat kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya kolaborasi dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema dan/atau stakeholder eksternal di luar pemerintahan 3. Intervensi yang	1. Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi 2. Menyempurnakan Rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain 3. Memastikan Rencana aksi menunjukkan adanya perbaikan/ inovasi untuk menjawab permasalahan dan bukan business as usual 4. Memastikan	-

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Target Baik	Skor	Skor Index	Capaian Index (%)	Catatan	Rekomendasi	Sanggah
									direncanakan dalam Rencana Aksi belum menunjukkan adanya perbaikan/inovasi untuk menjawab permasalahan 4. Capaian output rencana aksi belum 100%, yang menunjukkan monev rencana aksi belum berjalan dengan baik	Monev Rencana Aksi berjalan dengan baik sehingga dapat menunjang keberhasilan aksi tematik.	
26	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	1		0,58	0,58	58,00	1. Kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi 2. Rencana aksi belum memuat kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya kolaborasi dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema dan/atau stakeholder eksternal di luar pemerintahan 3. Intervensi yang direncanakan dalam Rencana Aksi belum	1. Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi 2. Menyempurnakan Rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain 3. Memastikan Rencana aksi menunjukkan adanya perbaikan/ inovasi untuk menjawab permasalahan dan bukan business as usual 4. Memastikan Monev Rencana Aksi berjalan dengan baik	-

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Target Baik	Skor	Skor Index	Capaian Index (%)	Catatan	Rekomendasi	Sanggah
									menunjukkan adanya perbaikan/inovasi untuk menjawab permasalahan 4. Capaian output rencana aksi belum 100%, yang menunjukkan monev rencana aksi belum berjalan dengan baik	sehingga dapat menunjang keberhasilan aksi tematik.	
27	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	1		0,70	0,70	70,00	1. Penetapan sasaran belum sepenuhnya menjawab permasalahan utama pada tema terkait 2. Terdapat indikator Sasaran RB Tematik yang belum sesuai dengan tugas, fungsi, peran dan/atau mandat RB Tematiknya		-
28	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)	1		0,87	0,87	87,00	Capaian output rencana aksi belum 100%		-
29	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Pengendalian Inflasi (Strategi Pembangunan)	1		0,72	0,72	72,00	1. Rencana aksi yang disusun belum sepenuhnya secara logis mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah 2. Kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses		-

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Target Baik	Skor	Skor Index	Capaian Index (%)	Catatan	Rekomendasi	Sanggah
									bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi		
30	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3		1,28	1,28	42,67	Angka Kemiskinan yang Digunakan Angka Maret Tahun 2025, sumber data BPS		-
31	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3		1,50	1,50	50,00	Data Realisasi Investasi Menggunakan Data Per Desember 2025		-
32	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3		2,25	2,25	75,00	Menggunakan Data Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023 Berdasarkan Surat Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Nomor OT.04.03/A.IV/1483/2025 Tanggal 5 Februari 2025		-
33	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3		2,15	2,15	71,67	Perhitungan Capaian Dampak PDN Mengacu pada KepmenPANRB 182 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2189		-
34	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	3		2,93	2,93	97,67	Berdasarkan Penilaian Kinerja Pengendalian Inflasi Kementerian Dalam Negeri dengan Menggunakan Data		-

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Target Baik	Skor	Skor Index	Capaian Index (%)	Catatan	Rekomendasi	Sanggah
									Tahun 2023 dan 2024, predikat penilaian kinerja pengendalian inflasi berada pada kriteria Baik - menuju ideal		
35	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Percepatan Hilirisasi	0.01				%			-
36	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Ketahanan Pangan	0.01				%			-
37	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	0.01				%			-
38	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan	0.01				%			-